

**PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, DAN KONTRIBUSI
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2016-2021**

SKRIPSI

OLEH:

**MARGARETH VIENITA S
198330218**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)21/12/22

**PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, DAN KONTRIBUSI
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2016-2021**

SKRIPSI

OLEH:

**MARGARETH VIENITA S
198330218**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)21/12/22

**PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, DAN KONTRIBUSI
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2016-2021**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area



**OLEH:
MARGARETH VIENITA S
198330218**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)21/12/22

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PENGARUH EFISIENSI, EFEKTIVITAS, DAN
KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
(PBB-P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN
2016-2021

Nama : MARGARETH VIENITA S

NPM : 198330218

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Disetujui oleh:

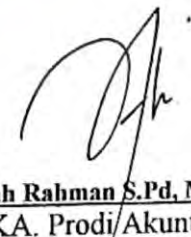
Komisi Pembimbing


(Desy Astrid Anindya, SE, M.Ak)

Pembimbing

Mengetahui,


(Ahmad Rafik, BBA (Hons), MMgt, Ph.D, CIMA)
Dekan


(Fauziah Rahman S.Pd, M.Ak)
KA. Prodi/Akuntansi

Tanggal Lulus : 06 Oktober 2022

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 06 Oktober 2022



MARGARETH VIENITA S
NPM : 198330218

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Margareth Vienita S
NPM : 198330218
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Efisiensi, Efektivitas, Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2016-2021. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 06 Oktober 2022
Yang menyatakan,

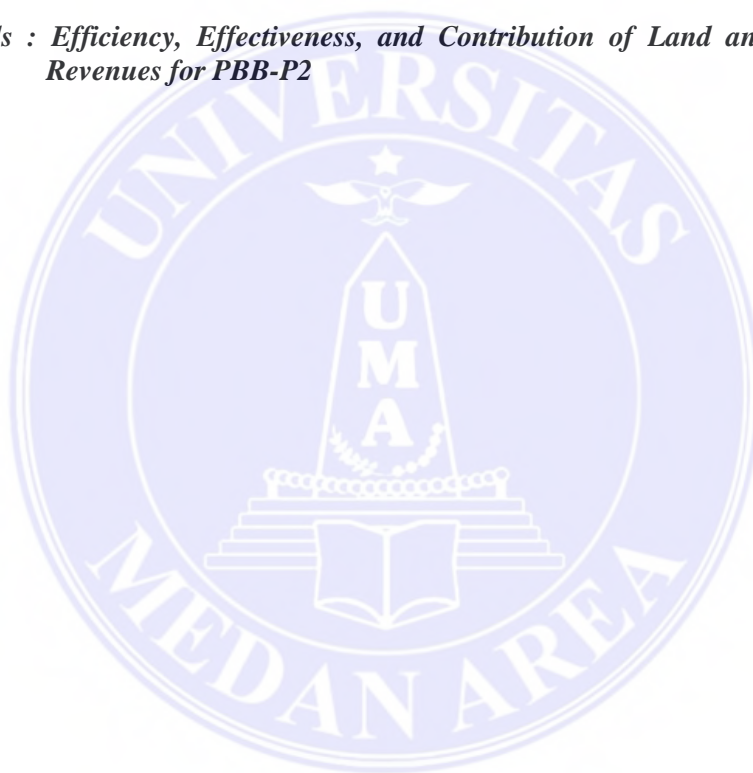


(Margareth Vienita S)
NPM : 198330218

ABSTRACT

This study aims to determine the efficiency, effectiveness, and contribution of land and building tax revenues from PBB-P2 to PAD in Batu Bara Regency in 2016-2021. The type of research used is quantitative research. The research location is the Regional Tax and Retribution Management Agency. The type of data used in this research is secondary data. The results of data analysis show that the level of efficiency of land and building tax receipts for PBB-P2 Batu Bara Regency in 2016-2021 is classified as efficient, namely an average of 41.59%. The level of effectiveness of land and building tax receipts for PBB-P2 Batu Bara Regency in 2016-2021 is classified as effective, which is an average of 104.95%. The contribution rate of land and building tax revenues for the Land and Building Tax PBB-P2 in Batu Bara Regency in 2016-2021 is very low, with an average of 20.86%.

Keywords : *Efficiency, Effectiveness, and Contribution of Land and Building Tax Revenues for PBB-P2*



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi, efektivitas, dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Batu Bara tahun 2016-2021. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Lokasi penelitian Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil analisis data menunjukkan, tingkat efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan PBB-P2 Kabupaten Batu Bara tahun 2016-2021 tergolong efisien yaitu rata-rata sebesar 41,59%. Tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan PBB-P2 Kabupaten Batu Bara tahun 2016-2021 tergolong efektif yaitu rata-rata sebesar 104,95 %. Tingkat kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan PBB-P2 Kabupaten Batu Bara Tahun 2016-2021 tergolong rendah sekali yaitu rata-rata sebesar 20,86%.

Kata kunci: Efisiensi Penerimaan, Efektivitas Penerimaan, Kontribusi Penerimaan dan Pendapatan Asli Daerah



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dengan judul Pengaruh Efisiensi, Efektivitas, dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2016-2021.

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini salah satu sarana untuk memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti akan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Di sisi lain, skripsi ini juga diajukan untuk melengkapi tugas akhir yang harus di selesaikan sebagai syarat guna meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Medan Area .

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dan dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:

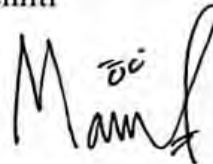
1. Bapak Prof Dr.Dadan Ramdan, M.Emg. M.sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Ahmad Rafiki, BBA, MMgt, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
3. Ibu Fauziah Rahman, S.Pd, M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
4. Ibu Desy Astrid Anindya, SE, M.Ak selaku dosen pembimbing, terima kasih atas segala kebaikan dan kesabaran ibu selama membimbing, serta memberikan kepercayaan dan dorongan kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.
5. Ibu Hasbiana Dalimunthe, SE, M.Ak selaku dosen pembimbing, terima kasih atas kesediaan waktu dan saran-saran yang telah ibu berikan kepada peneliti.
6. Ibu Aditya Amanda Pane, SE, M.Si selaku dosen sekretaris, terima kasih atas kesediaan waktu dan saran-saran yang telah ibu berikan kepada peneliti.
7. Seluruh bapak dan ibu dosen Universitas Medan Area atas bekal ilmu yang diartikan selama ini, serta memberikan nasihat dan motivasi kepada peneliti.

8. Seluruh staff pegawai Universitas Medan area atas segala bantuan dan dukungan kepada peneliti.
9. Kedua orangtua peneliti Bapak Drs Binahar Situmorang bunda Dra Relida Silalahi yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta mendoakan penulis sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini .
10. Adik Jesica Septiana Situmorang S.Pd dan adik Kelvin Maruli Situmorang yang selalu memberikan semangat kepada peneliti.
11. Kakak Selfry Flora Sari Situmorang, kakak Ferawati Panjaitan, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti agar segera menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh staff pegawai badan pengelola pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara atas segala bantuan dalam pengambilan data kepada peneliti.
13. Teman-teman penulis Akuntansi group A stambuk 2017 dan 2019, teman-teman mahasiswa konversi stambuk 2019 yang telah banyak mengisi hari-hari dari awal kuliah sampai menyelesaikan kuliah. serta semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam penyusunan tugas akhir ini.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu peneliti mohon kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian. Sehingga penulisan skripsi ini peneliti harapkan dapat dikembangkan lebih dalam lagi agar dapat memberikan nilai dan manfaat yang baik bagi seluruh pihak terutama bagi dunia pendidikan dan masyarakat.

Medan, 06 Oktober 2022

Peneliti



Margareth Vienita Situmorang

DAFTAR ISI

ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vii
KATAPENGATAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Efisiensi Penerimaan PBB-P2.....	9
2.1.1. Pengertian Efisiensi Penerimaan PBB-P2.....	9
2.1.2. Indikator Efisiensi Penerimaan PBB-P2	9
2.2. Efektivitas Penerimaan PBB-P2.....	10
2.2.1. Pengertian Efektivitas Penerimaan PBB-P2	10
2.2.2. Indikator Efektivitas Penerimaan PBB-P2.....	11
2.3. Kontribusi Penerimaan PBB-P2.....	12
2.3.1. Pengertian Kontribusi Penerimaan PBB-P2.....	12
2.3.2. Indikator Kontribusi Penerimaan PBB-P2	13
2.4. Perpajakan	13
2.4.1. Pengertian Perpajakan	13
2.4.2. Fungsi Perpajakan	14
2.4.3. Syarat Pemungutan Perpajakan.....	14
2.4.4. Pengelompokkan Perpajakan	15
2.5. Pajak Bumi dan Bangunan	16
2.5.1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	16
2.5.2. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan.....	17
2.5.3. Objek Pajak Bumi dan Bangunan	17
2.5.4. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan	17
2.6. Pendapatan Asli Daerah	18
2.6.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	18
2.6.2. Sumber Pendapatan Daerah	19
2.7. Kerangka Konseptual	23
2.8. Hipotesis Penelitian.....	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	29

3.1. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
3.1.1. Jenis Penelitian.....	29
3.1.2. Lokasi Penelitian.....	29
3.2. Populasi dan Sampel.....	30
3.2.1. Populasi.....	30
3.2.2. Sampel.....	30
3.3. Definisi Operasional Variabel.....	30
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	32
3.5. Teknik Analisis Data.....	32
3.5.1. Uji Statistik Deskriptif.....	32
3.5.2. Uji Asumsi Klasik.....	32
3.6. Uji Hipotesis.....	34
3.6.1. Uji Persamaan Regresi Berganda.....	34
3.6.2. Uji Parsial (Uji t).....	35
3.6.3. Uji Simultan (Uji F).....	35
3.6.4. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1. Hasil Penelitian.....	37
4.1.1. Sejarah Berdirinya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara.....	37
4.1.2. Visi dan Misi.....	38
4.1.3. Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara.....	39
4.2. Analisis Data.....	40
4.2.1. Analisis Data Deskriptif.....	40
4.2.1.1. Efisiensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Batu Bara Tahun 2016-2021.....	40
4.2.1.2. Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Batu Bara Tahun 2016-2021.....	42
4.2.1.3. Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Realisasi PAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2016-2021.....	44
4.2.2. Analisis Data Statistik.....	46
4.2.2.1. Uji Normalitas.....	46
4.2.2.2. Uji Multikolinearitas.....	47
4.2.2.3. Uji Heteroskedastisitas.....	48
4.2.2.4. Uji Autokorelasi.....	49
4.3. Pengujian Hipotesis.....	50
4.3.1. Analisis Regresi Linier Berganda.....	50
4.3.1.1. Uji Parsial (Uji t).....	51
4.3.1.2. Uji Simultan (Uji F).....	52
4.3.2. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	54
4.4. Pembahasan.....	54
4.4.1. Pengaruh Efisiensi Penerimaan Pajak Bumi dan	

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2016-2021	54
4.4.2. Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2016-2021	55
4.4.3. Pengaruh Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2016-2021	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61
5.1. Kesimpulan	61
5.2. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2016-2021 .	4
Tabel 2.1. Indikator Efisiensi Penerimaan PBB-P2.....	10
Tabel 2.2. Indikator Efektivitas Penerimaan PBB-P2	11
Tabel 2.3. Indikator Kontribusi Penerimaan PBB-P2.....	13
Tabel 2.4. Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3.1. Jadwal Penelitian	29
Tabel 3.2. Definisi Operasional Variabel	31
Tabel 4.1. Efisiensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Batu Bara Tahun 2016-2021	41
Tabel 4.2. Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Batu Bara Tahun 2016-2021	43
Tabel 4.3. Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Realisasi PAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2016-2021	45
Tabel 4.4. Hasil Uji Normalitas	47
Tabel 4.5. Hasil Uji Multikolinearitas.....	48
Tabel 4.6. Hasil Uji Autokorelasi	50
Tabel 4.7. Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	51
Tabel 4.8. Hasil Uji Parsial (Uji t)	51
Tabel 4.9 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	53
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual	24
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara.....	39
Gambar 4.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Laporan Realisasi APBD Tahun 2016.....	65
Lampiran 2. Laporan Realisasi APBD Tahun 2017.....	66
Lampiran 3. Laporan Realisasi APBD Tahun 2018.....	67
Lampiran 4. Laporan Realisasi APBD Tahun 2019.....	68
Lampiran 5. Laporan Realisasi APBD Tahun 2020.....	69
Lampiran 6. Laporan Realisasi APBD Tahun 2021.....	70
Lampiran 7. Efisiensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-2) di Kabupaten Batu Bara, Tahun 2016 – 2021	71
Lampiran 8. Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-2) di Kabupaten Batu Bara, Tahun 2016 – 2021	72
Lampiran 9. Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Realisasi PAD Kabupaten Batu Bara Tahun 2016-2021	73
Lampiran 10. Efisiensi, Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara, Tahun 2016-2021	74
Lampiran 11. Uji Normalitas	75
Lampiran 12. Uji Multikolinieritas	76
Lampiran 13. Uji Heterokedastisitas.....	77
Lampiran 14. Uji Autokorelasi	78
Lampiran 15. Uji Regresi Linier Berganda.....	79
Lampiran 14. Nilai Tabel t.....	80
Lampiran 15. Tabel Distribusi F	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan saat ini sedang berlangsung di tingkat nasional dan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sesuai dengan cita-cita nasional Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Indonesia membutuhkan sumber pendanaan untuk membangun dan mengelola pemerintahan. Salah satu sumber pendanaan yang paling penting adalah pajak.

Teori hak negara atas perpajakan menyatakan bahwa tanpa negara tidak mungkin individu dapat hidup dan berbisnis secara bebas di negara. Oleh karena itu, negara memiliki kekuasaan perpajakan mutlak. Keputusan No. 22 dan UU No. 22. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Pada tahun 1999, Keputusan No. 25 tentang Perimbangan Pendapatan dan Belanja antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintah pusat memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah. Menurut Khoirinnisa (2020:2), pemberian otonomi daerah terdiri dari 3 (tiga) tujuan utama ,antara lain sebagai berikut:

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya manusia.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat di setiap daerah otonom.
3. Memperkuat dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi masyarakat.

Dengan otonomi daerah, harapan kesejahteraan masyarakat akan sangat bergantung pada pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah harus menggali sumber pendapatan daerahnya sendiri semaksimal mungkin karena PAD merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan otonomi daerah.

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak, dan pendapatan kompensasi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah terpisah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil melaksanakan otonomi daerah. Sebaliknya jika PAD yang diperoleh pemerintah daerah semakin berkurang atau berkurang, maka pelaksanaan otonomi daerah tidak maksimal. Besarnya PAD setiap daerah kemungkinan berbeda-beda karena sesuai dengan potensi daerah dan kemampuan pengelolaan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari :

- a. Hasil pajak daerah,
- b. Hasil retribusi daerah,
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pajak bumi dan bangunan merupakan sumber penerimaan negara yang potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Sejak Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah diundangkan pada tanggal 15 September 2009, hak untuk memungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan telah diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota.

Menurut Mayadi (2015) prinsip dasar dan alasan utama pengalihan PBB-P2 ke pajak daerah antara lain: Pertama, secara teoritis, PBB-P2 lebih bersifat lokal (asal daerah), visibilitas, objek pajak tidak dialihkan, dan Wajib Pajak serta Kenikmatan penerimaan pajak sangat erat terkait. Kedua, pembayaran transfer PBB-P2 diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan memperbaiki struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Ketiga, meningkatkan pelayanan publik (*public services*), akuntabilitas, dan transparansi di dalam pengelolaan PBB-P2. Keempat, berdasarkan praktik di banyak negara, PBB-P2 atau *Property Tax* termasuk di dalam model *local tax*.

Menurut Masitoh (2018:4) tujuan Pengalihan pengelolaan PBB-P2 jadi pajak daerah sesuai bersama Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: 1) Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah 2) Memberikan kesempatan baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah model pajak daerah dan retribusi daerah) 3) Memberikan kewenangan yang lebih besar di dalam perpajakan dan retribusi bersama memperluas basis pajak daerah 4) Memberikan kewenangan kepada daerah di dalam penetapan tarif pajak daerah 5) Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan agar mencapai tujuan yang diharapkan diperlukan adanya peran sumber daya manusia yang mampu untuk menjalankan setiap aturan terkait, sehingga dapat berjalan dengan baik pada setiap

implementasi. Hal ini membutuhkan pengetahuan serta keahlian yang memadai dalam setiap persoalan yang terkait dengan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam menyelenggarakan Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah dapat melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efektivitas atau mengoptimalkan potensi yang ada serta mengupayakan agar efektivitas setara, sesuai dengan ketentuan dan perhitungan pemerintah mengenai efektivitas tersebut. Agar terjadi peningkatan PBB-P2 perlu dilakukan upaya efektivitas dan efisiensi penerimaan PBB-P2. Salah satunya lewat subjek dan objek pendapatan daerah, agar mampu meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 - 2021

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Sisa Anggaran yang Belum Terealisasi	Persentase
2016	23.272.500.000,00	26.281.463.172,50	3.008.963.172,50	112,93
2017	33.961.874.653,00	39.618.904.895,00	5.649.530.242,00	116,66
2018	31.888.002.000,00	36.507.871.321,00	4.619.869.321,00	114,49
2019	60.908.377.142,00	97.929.455.647,00	37.021.078.505,00	160,78
2020	131.685979.991,65	145.593.650.500,00	1.525.579.991.65,65	101.17%
2021	136.174.029.210,00	110.310.000.000,00	25.864.029.210,00	123,45%

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Batu Bara Tahun 2016-2021

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun 2016–2019 mengalami Fluktuasi. Dimana pada tahun 2018 mengalami penurunan dibanding dengan tahun lainnya. Pada tahun 2016 realisasi PAD sebesar Rp. 26.281.463.172,50, pada tahun 2017 realisasi PAD mengalami kenaikan sebesar Rp. 39.618.904.895,00. pada tahun 2018 realisasi PAD mengalami penurunan menjadi Rp. 36.507.871.321,00. Kemudian realisasi PAD mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar Rp. 97.929.455.647,00. Pada tahun 2020

realisasi PAD mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 145.593.650.500,00 dan pada tahun 2021 realisasi PAD mengalami penurunan sebesar Rp. 110.310.000.000,00. Dapat dilihat dari data realisasi tahunan Kabupaten Batu Bara mengalami fluktuasi dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Batu Bara telah berupaya untuk meningkatkan sumber pendapatan daerahnya. Salah satu cara meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah yaitu penerimaan PBB-P2. Realisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ketahun belum bisa dijadikan pedoman dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara dengan cara menghitung efektivitas dan efisiensi pemungutan PBB-P2 hal ini bisa mendukung pemerintah di dalam mengukur kesuksesan pemungutan PBB-P2.

Menurut Khoirinnisa (2020:6) Efisiensi adalah kemampuan untuk mendapatkan hal-hal yang dilakukan dengan benar atau hubungan antara masukan dan keluaran yang bertujuan untuk meminimalisasi sumber-sumber biaya. Rasio efisiensi pendapatan dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh PBB-P2 dengan realisasi penerimaan PBB-P2. Semakin kecil nilai rasio efisiensi ini maka semakin baik kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan. Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Jika satu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi berikutnya dianggap secara efektif terjadi bersama. Rasio efektivitas pendapatan PBB-P2 dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PBB-P2 dengan target penerimaan yang dianggarkan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output

yang dihasilkan bisa memenuhi target yang diharapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk dapat menjelaskan dan mengetahui tentang efisiensi penerimaan PBB-P2, efektivitas penerimaan PBB-P2 dan kontribusi pajak PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Batu Bara. Berdasarkan uraian di atas maka, peneliti tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul **“Pengaruh Efisiensi, Efektivitas, dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2016-2021”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Batu Bara tahun 2016-2021?
2. Apakah efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Batu Bara tahun 2016-2021?
3. Apakah kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Batu Bara tahun 2016-2021?
4. Apakah efisiensi, efektivitas, dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Batu Bara tahun 2016-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan

penelitian ini untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Untuk mengetahui pengaruh efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Batu Bara tahun 2016-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Batu Bara tahun 2016-2021.
3. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Batu Bara tahun 2016-2021.
4. Untuk mengetahui efisiensi, efektivitas, dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Batu Bara tahun 2016-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

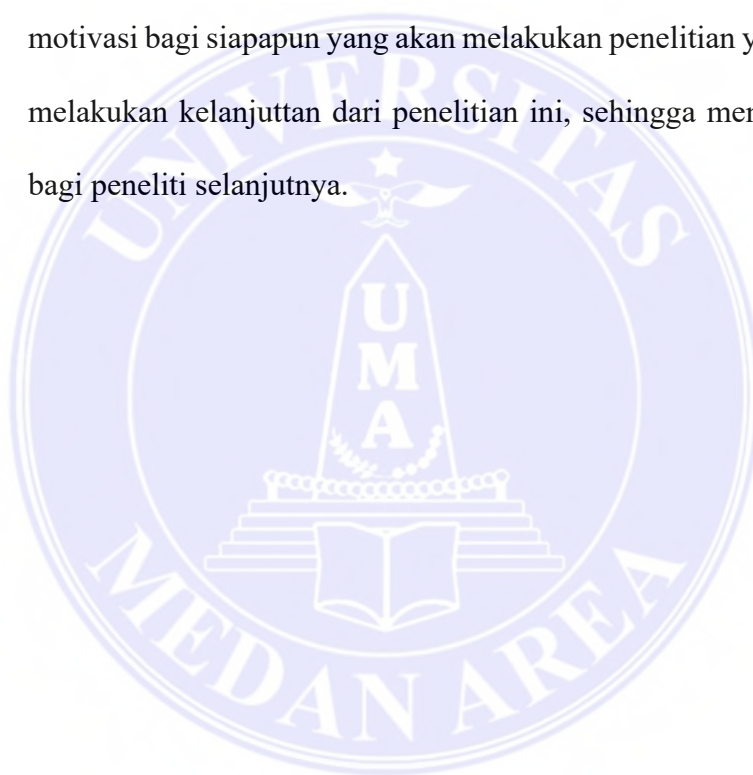
Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat tercapai.

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai proses pengalihan pengelolaan PBB menjadi pajak daerah. Mengetahui tingkat efisiensi, efektivitas dan kontribusi PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah.
2. Bagi masyarakat, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai peran pemerintah dalam mensosialisasikan PBB-P2 dan dampaknya

terhadap pendapatan asli daerah.

3. Bagi pemerintah, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan evaluasi bagi pemerintah mengenai tingkat efisiensi, dan efektivitas serta kontribusi PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah, sehingga pihak pemerintah dapat melakukan dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah.
4. Bagi peneliti selanjutnya, Penelitian ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi siapapun yang akan melakukan penelitian yang serupa atau melakukan kelanjutan dari penelitian ini, sehingga menjadi tolak ukur bagi peneliti selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Efisiensi Penerimaan PBB-P2

2.1.1 Pengertian Efisiensi Penerimaan PBB-P2

Menurut Ainiyah,dkk (2020:4) efisiensi penerimaan PBB-P2 adalah suatu ukuran kegiatan atau proses yang dapat dinilai dengan membandingkan antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*). Menurut Purwolaksono (2010) efisiensi penerimaan PBB-P2 yaitu menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan PBB dengan realisasi penerimaan PBB yang diterima.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa efisiensi penerimaan PBB-P2 adalah membandingkan antara biaya pemungutan PBB-P2 dengan realisasi penerimaan PBB-P2. Biaya pemungutan PBB-P2 terdiri dari biaya ATK, biaya perjalanan dinas dan biaya cetak surat pemberitahuan pajak terutang.

2.1.2 Indikator Efisiensi Penerimaan PBB-P2

Indikator efisiensi Penerimaan PBB-P2 menjelaskan hubungan antara sumber daya tenaga kerja (seperti karyawan, upah, biaya manajemen) yang diinvestasikan oleh unit organisasi dan *output* yang dihasilkan. Indikator ini memberikan informasi tentang konversi input menjadi *output* (yaitu: efisiensi proses internal). Rasio efisiensi penerimaan dihitung dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh PBB-P2 dengan penerimaan dari PBB-P2. Efisiensi penerimaan PBB-P2 dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PBB-P2}}{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}} \times 100\%$$

Semakin kecil rasio efisiensi, semakin baik kinerja pemerintah di bidang perpajakan. Secara umum, nilai rasio efisiensi pendapatan dapat dikategorikan sebagai berikut.

Tabel 2.1 Indikator Efisiensi

Persentase (%)	Kriteria
>100	Tidak efisien
=100	Efisien berimbang
<100	Efisien

Sumber : kemenkeu, akuntansi keuangan pemerintah daerah (2010)

Proses operasional suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah rendahnya.

2.2 Efektivitas Penerimaan PBB-P2

2.2.1 Pengertian Efektivitas Penerimaan PBB-P2

Menurut Utiahman (2016:272) efektivitas penerimaan PBB-P2 menunjukkan bahwa sampai seberapa besar tercapaiannya suatu tujuan yang ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sesungguhnya tercapai.

Menurut Wakhidah (2017) efektivitas penerimaan PBB-P2 merupakan suatu kemampuan dalam memilih tujuan yang paling cocok dengan langkah-langkah yang tepat agar tepat agar tercapai tujuan organisasi. Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dianggap beroperasi secara efektif.

Efektivitas tidak menunjukkan berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biayanya bisa melebihi anggaran dan mungkin dua kali atau bahkan tiga kali lipat anggaran. Efektivitas hanya tergantung pada apakah

proyek atau kegiatan mencapai tujuan yang dinyatakan. Jika hasil kegiatan lebih dekat dengan tujuan efektivitasnya lebih tinggi, dan dapat disimpulkan bahwa efektivitasnya terkait dengan kinerja semua tugas utama, pencapaian tujuan, waktu dan partisipasi aktif anggota. Dari sudut pandang di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerimaan PBB-P2 adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.

2.2.2 Indikator Efektivitas Penerimaan PBB-P2

Indikator efektivitas PBB-P2 menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja yang dilakukan suatu unit organisasi. Rasio efektivitas pendapatan PBB-P2 dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PBB-P2 dengan target penerimaan yang dianggarkan, dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Target Penerimaan PBB-P2}} \times 100\%$$

Efektivitas pendapatan menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mobilisasi pendapatan sesuai dengan target. Secara umum, nilai efektivitas pendapatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Efektivitas

Persentase (%)	Kriteria
<100	Tidak efektif
=100	Efektif berimbang
>100	Efektif

Sumber kemenkeu, akuntansi keuangan pemerintah daerah (2010)

Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan

efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada hasil. Suatu organisasi, rencana, atau kegiatan dianggap efektif jika keluaran yang dihasilkan oleh suatu organisasi, rencana, atau kegiatan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau pengeluaran dikatakan bijaksana.

2.3 Kontribusi Penerimaan PBB-P2

2.3.1 Pengertian Kontribusi Penerimaan PBB-P2

Menurut Ratulangi (2016) kontribusi PBB-P2 dapat dijelaskan sebagai sumbangan yang diberikan dari PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika pemerintah dapat mengoptimalkan sumber pendapatan PBB-P2, potensi pendapatan akan lebih besar, dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) akan meningkat. Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Dalam memahami kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah pada suatu periode tertentu dengan pendapatan asli daerah (PAD) pada suatu periode tertentu.

Menurut Setiawan Kontribusi penerimaan PBB-P2 adalah besarnya sumbangan yang dihasilkan dari sebuah kegiatan yang dilakukan. Kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap besarnya pendapatan asli daerah.

2.3.2 Indikator Kontribusi Penerimaan PBB-P2

Untuk mengevaluasi kontribusi pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan, rumus dapat digunakan.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Penilaian kinerja rasio kontribusi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3 Indikator Kontribusi

Persentase (%)	Kriteria
0-25	Rendah sekali
>25-50	Rendah
>50-70	Sedang
>75-100	Tinggi

Sumber : kemenkeu, akuntansi keuangan pemerintah daerah (2010)

2.4 Perpajakan

2.4.1 Pengertian Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2009:1) Perpajakan adalah pembayaran yang dibayarkan orang kepada kas negara sesuai dengan undang-undang (dilaksanakan), tetapi tidak ada jasa sejenis yang langsung ditampilkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Prof. Dr. Adriani (dalam Kusuma 2010:13) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. MJH Smeets (dalam Kusuma 2010:13) pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang menurut norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya tanpa adanya kontra prestasi yang ditunjukkan dalam hal yang individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan pajak adalah kontribusi orang pribadi atau badan berutang pembayaran pajak kepada negara dipaksa oleh hukum tidak diperoleh melalui kompensasi langsung dan penggunaan untuk tujuan negara.

2.4.2 Fungsi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2009: 1) Ada dua fungsi perpajakan, yaitu:

- a. Fungsi Anggaran (*budgetair*) Perpajakan merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk mendanai pengeluarannya.
- b. Fungsi regulasi perpajakan digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

2.4.3 Syarat Pemungutan Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2009:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pajak harus adil. Sesuai dengan tujuan hukum yaitu untuk mencapai keadilan, pelaksanaan hukum dan perpajakan harus adil. Itu adil dalam undang-undang, dan perpajakan umumnya merata, antara lain, dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing orang. Penegakan hukumnya cukup adil, yaitu memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, menunda pembayaran, dan mengajukan banding ke pengadilan pajak.
- b. Pajak harus berdasarkan undang-undang. Di Indonesia, perpajakan diatur dalam Pasal 23 ayat 2 UUD 1945. Hal ini memberikan jaminan hukum bagi negara dan warganya untuk menyatakan keadilan. Tidak mengganggu perekonomian (kondisi ekonomi) Pengambilalihan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan, sehingga tidak menyebabkan perlambatan sosial ekonomi.
- c. Perpajakan harus efisien (kondisi keuangan). Sesuai dengan fungsi anggaran, biaya perpajakan harus lebih rendah dari hasil pemungutan.

- d. Sistem perpajakan harus sederhana. Sistem perpajakan yang sederhana akan mendorong dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Undang-undang perpajakan yang baru telah memenuhi persyaratan ini.

2.4.4 Pengelompokan Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2009:5) pengelompokan pajak dibedakan menjadi 2 yaitu berdasarkan golongan dan sifatnya.

a. Menurut Golongannya

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak dan tidak dapat dipungut atau dititipkan oleh orang lain. Misalnya pajak penghasilan.
- 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dipungut atau dititipkan kepada orang lain. Misalnya pajak pertambahan nilai.

b. Menurut sifatnya

- 1) Pajak *subyektif*, yaitu pajak yang berasal dari atau berdasarkan subyeknya, yaitu pajak yang menitikberatkan pada status wajib pajak. Misalnya pajak penghasilan.
- 2) Perpajakan *obyektif*, yaitu pengenaan pajak yang berasal dari objeknya, tidak ada hubungannya dengan keadaan pribadi wajib pajak. Contoh pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah.

2.5 Pajak Bumi dan Bangunan

2.5.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Khoirinisa (2020:22) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Pedesaan dan perkotaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai dan/atau digunakan oleh orang pribadi atau badan, kecuali untuk areal yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Menurut Sleman (2013:242) pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Berdasarkan Undang-Undang No .Tahun 1994 dalam (Noor 2020: 141) Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi /tanah dan atau bangunan.dapat disimpulkan Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan dengan adanya keuntungan.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) adalah pajak yang dikenakan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi orang pribadi atau badan yang mempunyai hak atasnya atau mendapatkan manfaatnya padanya.

Yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah sebagai berikut.

- Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan
- Jalan tol
- Kolam renang

- Pagar mewah
- Tempa olahraga
- Taman mewah

2.5.2 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar hukum pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah Undang-undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 12 Tahun 1994.

2.5.3 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah objek atas bumi dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai dan/atau digunakan oleh orang pribadi atau badan, kecuali areal yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, kehutanan dan pertambangan.

2.5.4 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Yang dimaksud dengan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang benar-benar memiliki hak atas tanah, dan/atau memperoleh penghasilan dari tanah, dan/atau memiliki, menguasai, dan memperoleh penghasilan bangunan.

2.6 Pendapatan Asli Daerah

2.6.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Darise (2008: 33) pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan

kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah, sumber fiskal daerah yang bersumber dari daerah yang bersangkutan meliputi penerimaan pajak daerah, pajak daerah yang dihasilkan dari pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Menurut Abdul Halim (2020), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua pendapatan daerah yang berasal dari sumber ekonomi utama daerah. Komponen pendapatan asli daerah dibagi menjadi empat jenis pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil seluruh perusahaan yang ada di daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah tersendiri, dan PAD lainnya yang sah. Menurut Datu (2012), pendapatan asli daerah sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan, karena dana tersebut merupakan milik pemerintah daerah itu sendiri, sehingga pemerintah daerah memiliki pengelolaan penuh atas dana tersebut. Menurut Siahaan (2005:15) dalam (Octovido, 2014) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.6.2 Sumber Pendapatan Daerah

- a. Pajak daerah adalah iuran wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk

mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Retribusi daerah, termasuk hasil pelayanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Kabupaten.

- b. Retribusi daerah adalah pajak daerah yang digunakan untuk membayar jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh manfaat pribadi.

Retribusi daerah ada 3 macam yaitu:

- 1) Retribusi Jasa Umum
- 2) Retribusi Jasa Usaha
- 3) Retribusi Perizinan

- c. Hasil pemisahan pengelolaan kekayaan daerah Hasil pemisahan pengelolaan kekayaan daerah antara lain:

- 1) Penyertaan bagi hasil BUMD
- 2) Penyertaan bagi hasil BUMN/BUMD/Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- 3) Partisipasi dalam *private equity* Bagi hasil perusahaan atau kelompok masyarakat.

- d. Lain-lain PAD yang Sah.

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis-jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga

- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- 5) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pembelian barang dan/atau jasa di daerah.

e. Dana perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah. Kelompok pendapatan berupa dana perimbangan ini digolongkan menjadi 3 jenis pendapatan (untuk provinsi) dan 4 jenis (untuk kabupaten/ kota), yaitu :

- a) Bagi hasil Pajak/ Bukan Pajak yang meliputi :
 - 1) Bagi Hasil Pajak
 - 2) Bagi Hasil Bukan Pajak
- b) Dana Alokasi Umum
 - 1) Dana Alokasi Khusus, yang meliputi:
 - 2) Dana Alokasi Khusus Reboisasi
 - 3) Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi
- c) Bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari Provinsi (untuk kab/kota)

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Soleh Arifin	2015	Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Serta Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Lampung Selatan tahun 2015-2018 secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai

			Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam	interpretasi sangat efisien, dengan rata-rata presentase sebesar 2,47%. Tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten Lampung Selatan secara keseluruhan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan bahwa standar nilai interpretasi sangat efektif, dengan persentase rata-rata sebesar 148,78%. Kontribusi pendapatan PBB-P2 terhadap pendapatan mentah keseluruhan Kabupaten Lampung Selatan dari tahun 2015 hingga 2018 menunjukkan bahwa standar untuk menjelaskan nilainya sangat rendah, dengan persentase rata-rata 7,27%.
2.	Muhammad Ilham Akbar	2017	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan (PBB P-2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai koefisien determinasi sebesar 37,9% sedangkan 62,1% dijelaskan oleh faktor-faktor yang tidak diteliti.

3.	Siti Masitoh	2018	Analisis Efisiensi, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Banyumas tahun 2013-2016 secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat efisien, dengan rata-rata presentase sebesar 4,62%. Tingkat Efektivitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten Banyumas tahun 2013-2016 secara Keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat efektif, dengan rata-rata presentase sebesar 110,46%. Kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2013-2016 secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat kurang, dengan rata-rata presentase sebesar 9,97%.
4.	Chika Suci Noviani	2019	Analisis efektivitas, Efisiensi penerimaan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan PBB-P2 dan kontribusi pendapatan asli Daerah Kabupaten Bangka barat tahun 2014-2018	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan PBB P2 Kabupaten Bangka Barat tahun 2014-2018 secara keseluruhan menunjukkan kriteria efektif, dengan rata-rata persentase sebesar 97%. Tingkat efisiensi penerimaan PBB P2 secara keseluruhan menunjukkan kriteria sangat efisien, dengan rata-rata persentase sebesar 5,2%. Kontribusi penerimaan PBB P2 terhadap PAD secara keseluruhan menunjukkan kriteria sangat kurang, dengan rata-rata persentase 4%.

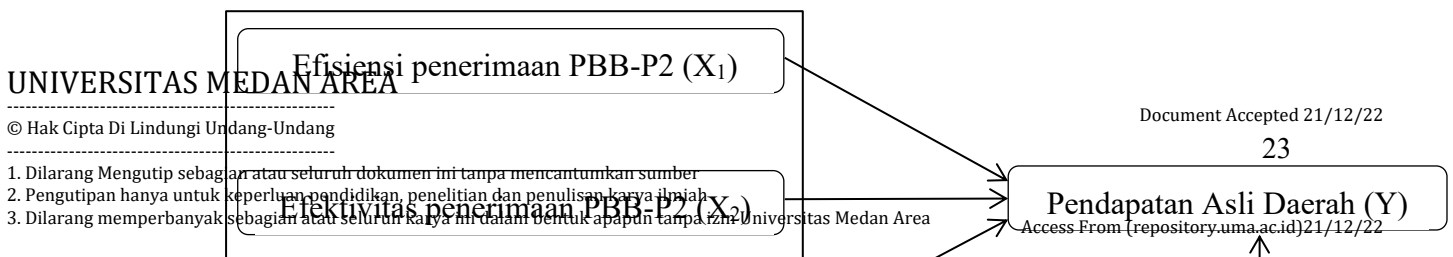
5.	Sri Devi Eka Suherman	2020	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Efektivitas pajak daerah di Kabupaten Enrekang sangat efektif (2) Kontribusi pajak daerah dikategorikan kurang. Sehingga diharapkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Enrekang dapat memaksimalkan kinerjanya dalam mengembangkan basis data pajak dan terus menggali potensi pajak agar penerimaan pajak di Kabupaten Enrekang menjadi lebih optimal.
----	--------------------------	------	---	---

Sumber: Data diperoleh oleh peneliti (2022)

2.7 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah model konseptual tentang bagaimana sebuah teori berhubungan dengan berbagai faktor yang akan diidentifikasi sebagai isu penting. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak pusat, dan merupakan bagian yang signifikan dari pendapatan diberikan kepada kabupaten karena PBB adalah pajak dari 90% dari kabupaten pendapatan dikembalikan ke kabupaten sebagai bagi hasil bahkan ada tanda-tanda diawal pelaksanaan otonomi daerah, seperti tarik- menarik antara pemerintah pusat dan daerah, lahirnya peraturan daerah dan keputusan kepala daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan hukum lainnya. Di Indonesia, salah satu kebijakan perpajakan pemerintah pusat yang berdampak signifikan terhadap pendapatan daerah adalah PBB. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah selalu sangat berhati-hati dalam merumuskan kebijakan PBB, karena PBB melibatkan berbagai aspek yang sangat sensitif secara ekonomi.

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara untuk pertanyaan penelitian sampai dikonfirmasi oleh data yang dikumpulkan. Bersifat sementara, karena jawaban yang diberikan hanya berdasarkan teori yang relevan, dan tidak berdasarkan fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis asosiasi adalah jawaban sementara atas pertanyaan asosiasi, yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih.

Berdasarkan kerangka konseptual penelitian, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.8.1 Pengaruh Efisiensi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan PBBP2 memerlukan biaya untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan seperti biaya pada saat pemungutan/ penagihan yang diberikan kepada tim pemungut pajak. Hal ini berkaitan dengan realisasi pendapatan yang akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Dalam penelitian yang dilakukan Ryfal Yoduke dan Sri Ayem (2015)

dengan judul Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014, variabel efisiensi berpengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2009 ke tahun 2014.

Adapun hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Efisiensi penerimaan PBB-P2 berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.8.2 Pengaruh Efektivitas penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Suatu organisasi dinilai berhasil dapat dinilai dari ketercapaian tujuanyang dikehendaki. Dalam hal ini adalah ketercapaian dalam merealisasikan penerimaan PBB-P2 sesuai dengan target atau ketetapan yang telah dibuat. Dengan mengetahui besarnya tingkat efektivitas, dapat menjadi salah satu pertimbangan evaluasi Pemerintah Daerah dalam hal ini BPPKAD dalam merealisasikan penerimaan PBB-P2 ditahun mendatang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan Septiansyah, Diamonalisa Sofianty, dan Helliana (2018), penelitian tersebut berjudul Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir dan Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan Variabel Efektivitas memiliki pengaruh.

Adapun hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: Efektivitas penerimaan PBB-P2 berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.8.3 Pengaruh Kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adanya pengalihan pendapatan dari sektor PBB-P2 menjadi pajak daerah, sehingga seluruh hasil pengelolaan akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah dan tidak ada lagi bagi hasil pajak kepada pemerintah pusat. Pemerintah Daerah sekarang mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan bagi Pendapatan Asli Daerah. Dalam penelitian Septiani Hanipah dan Dudi Pratomo (2015) yang berjudul “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah”, variabel kontribusi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Adapun hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: Kontribusi penerimaan PBB-P2 berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.8.4 Pengaruh efisiensi, efektivitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) secara simultan terhadap pendapatan asli daerah (PAD)

Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan PBB-P2 memerlukan biaya untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan seperti biaya pada saat pemungutan/ penagihan yang diberikan kepada tim pemungut pajak. Hal ini berkaitan dengan realisasi pendapatan yang akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Dimana Suatu organisasi dinilai berhasil dapat dinilai dari ketercapaian tujuan yang dikehendaki. Dalam hal ini adalah ketercapaian dalam merealisasikan penerimaan PBB-P2 sesuai dengan target atau ketetapan yang telah dibuat. Dengan mengetahui besarnya tingkat efektivitas, dapat menjadi salah satu pertimbangan evaluasi Pemerintah

Daerah dalam hal ini BPPKAD dalam merealisasikan penerimaan PBB-P2 ditahun mendatang. Adanya pengalihan pendapatan dari sektor PBB-P2 menjadi pajak daerah, sehingga seluruh hasil pengelolaan akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah dan tidak ada lagi bagi hasil pajak kepada pemerintah pusat. Pemerintah Daerah sekarang mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan bagi Pendapatan Asli Daerah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Khoironisha, 2020) menyebutkan bahwa secara simultan efisiensi, efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten kudas tahun 2015-2019.

Adapun hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4: Efisiensi, efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB-P2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Arikunto (2019:27), penelitian kuantitatif adalah metode yang memerlukan penggunaan angka-angka dari pengumpulan data, interpretasi data, dan hasil.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diteliti adalah Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Jalan Lintas Sumatera KM.110 Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih, 21256 Kabupaten Batu Bara.

3.1.3 Waktu penelitian

Tabel 3.1.3
Waktu Penelitian

No.	Keterangan	Periode 2021-2022													
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt
1.	Penyusunan Proposal														
2.	Seminar Proposal														
3.	Pengumpulan Data														
4.	Analisis Data														
5.	Seminar Hasil														
6.	Pengajuan Meja Hijau														
7.	Meja Hijau														

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2022)

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Manullang dan Pakpahan (2014:70) Populasi adalah sumber dari data yang dibutuhkan. Populasi pada penelitian ini adalah laporan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Batu Bara tahun 2016-2021 yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

3.2.2 Sampel

Menurut Darmadi (2014:57) sampel adalah sebagian unsur populasi yang dijadikan objek/subjek penelitian. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling*, yaitu tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap elemen untuk dipilih sebagai sampel. Teknik yang digunakan adalah *sampling jenuh* yang merupakan teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi dijadikan sampel. Sampel pada penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Batu Bara tahun 2016-2021 yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Menurut Khoirinnisa (2020) definisi operasional variabel adalah secara operasional mendefinisikan variabel berdasarkan karakteristik yang dapat diamati, memungkinkan seorang peneliti untuk melakukan pengamatan atau pengukuran yang cermat terhadap suatu objek atau fenomena. Definisi operasional masing-masing variabel, antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi Operasional	Indikator/Alat Ukur	Skala
1.	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Semua pendapatan daerah yang berasal dari sumber pendapatan asli daerah. Perbandingan pajak daerah dengan pajak daerah. Proporsi pajak daerah dan pajak daerah. Sumber: Kemenkeu,akuntansi keuangan pemerintah daerah (2010)	$\frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$ Sumber: Kemenkeu,akuntansi keuangan pemerintah daerah (2010)	Rasio untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern
2.	Efisiensi penerimaan PBB-P2 (X ₁)	Suatu proses yang dilakukan untuk mengukur dan membandingkan keluaran dan masukan, atau mengukur perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Sumber:Kemenkeu,akuntansi keuangan pemerintah daerah (2010)	$\frac{\text{Biaya Pemungutan PBB-P2}}{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}} \times 100\%$ Sumber: Kemenkeu,akuntansi keuangan pemerintah daerah (2010)	Rasio untuk menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang di keluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima
3.	Efektivitas penerimaan PBB-P2 (X ₂)	Pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Efektivitas menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan kegiatan/kebijakan, dimana ukuran efektivitas merupakan cerminan dari output. Sumber: Kemenkeu,akuntansi keuangan pemerintah daerah (2010)	$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Target Penerimaan PBB-P2}} \times 100\%$ Sumber: Kemenkeu,akuntansi keuangan pemerintah daerah (2010)	Rasio untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah

4.	Kontribusi penerimaan PBB-P2 (X_3)	<p>Sumbangan yang diberikan dari PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jika pemerintah dapat mengoptimalkan sumber penerimaan PBB P2 dan potensi Penerimaannya semakin tinggi maka kontribusi terhadap pendapatan asli daerah akan meningkat.</p> <p>Sumber: Kemenkeu ,akuntansi keuangan pemerintah daerah (2010)</p>	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$ <p>Sumber: Kemenkeu,akuntansi keuangan pemerintah daerah (2010)</p>	<p>Rasio untuk menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode keperiode berikutnya</p>
----	--	---	--	---

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2022)

3.4 Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Manullang dan Pakpahan (2014:87) data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip peneliti guna kepentingan penelitiannya. Data sekunder yang telah diolah lebih lanjut menjadi bentuk- bentuk seperti tabel, grafik, diagram, gambar, dan sebagainya. Contoh data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui dokumentasi. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Pajak Kabupaten Batu Bara.

3.5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data yang bersumber dari data sekunder, yaitu data biaya pemungutan PBB-P2, target penerimaan PBB-P2, realisasi penerimaan PBB-P2 serta Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara tahun 2016-2021. Data tersebut diperoleh dengan cara dokumentasi yang berasal dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara.

3.5.1. Analisis Data Deskriptif

Menurut Sugiyono (2016:192), Analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian.

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terdapat variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini, untuk mengetahui apakah data normal, dapat dilakukan dengan menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov*, yang dikatakan berdistribusi normal bila nilai *Asymp. Sig.* lebih besar dari 0,05.

2) Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Dalam penelitian ini multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Ghozali (2016) mengatakan multikolinearitas terjadi jika nilai *tolerance* $\leq 0,1$ dan nilai VIF ≥ 10 .

3) Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah nilai-nilai dalam model regresi memiliki pertidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya (Ghozali, 2005). Dalam penelitian ini, uji asumsi heteroskedastisitas menggunakan uji *Glejser* dengan meregresikan *absoluteresidual* dengan variabel independen. Heteroskedastisitas terjadi jika variabel independen signifikan mempengaruhi *absolute residual*.

4) Uji Autokorelasi

Menurut (Manullang dan Pakpahan, 2014) Uji Autokorelasi dirancang untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara *confounding error* pada periode t dengan error pada periode $t-1$ (periode sebelumnya) dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah regresi tanpa autokorelasi.

3.6. Uji Persamaan Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, X_3) dengan variabel dependen (Y) (Khoirinnisa, 2016). Analisis ini untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel

independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen positif atau negatif. Dalam penelitian ini menggunakan rumus persamaan regresi linier berganda untuk menganalisis data. Bentuk persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Asli Daerah

a = Konstanta

b₁ = Koefisien regresi antara efisiensi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah

b₂ = Koefisien regresi antara efektivitas penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah

b₃ = Koefisien regresi antara kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah

X₁ = Efisiensi penerimaan PBB-P2

X₂ = Efektivitas penerimaan PBB-P2

X₃ = Kontribusi penerimaan PBB-P2

e = Standar error

3.7 Uji Hipotesis

3.7.1 Uji Parsial (Uji-t)

Uji statistik t (t-test) dilakukan untuk memprediksi ada tidaknya pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut Ghozali dalam penelitian (Wulandari, 2018) Uji statistik t pada umumnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependennya

dengan menganggap variabel independen yang lain konstan. Pengujian koefisien regresi masing-masing variabel adalah:

$H_0 : \beta_i = 0$ (tidak ada pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat).

$H_1 : \beta_i \neq 0$ (ada pengaruh variabel independen dengan variabel dependen).

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka variabel independen i secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
3. Jika $p\text{-value} < (0,05)$ maka H_0 ditolak, berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
4. Jika $p\text{-value} > (0,05)$ maka H_0 diterima, berarti variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen..

Nilai t_{hitung} dapat dicari dengan rumus:

Jika $t_{hitung} > t_{tabel} (\alpha, n-k-1)$, maka ditolak

Jika $t_{hitung} < t_{tabel} (\alpha, n-k-1)$ maka diterima

3.7.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F untuk mengamati (sekaligus) pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika tingkat probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Proses pengujiannya adalah setelah menghitung F_{hitung} , kemudian membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} .

Kriteria keputusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ tingkat signifikansi (α) $< 0,05$ maka H_a ditolak (H_0 diterima), yang berarti secara simultan semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Apabila $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$ dan tingkat signifikansi (α) $> 0,05$ maka H_a diterima (H_0 ditolak) yang berarti secara simultan semua variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.7.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya mengukur sejauh mana model dapat menjelaskan perubahan yang relevan. Koefisien determinasi berada di antara nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perubahan variabel dependen sangat terbatas. Menurut Ghozali, 2007 dalam penelitian (Wulandari, 2018) menyebutkan bahwa nilai yang mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen menyediakan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Tingkat efisiensi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Batu Bara tahun 2016–2021 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap realisasi PAD.
2. Tingkat Efektivitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten Batu Bara tahun 2016-2021 berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi PAD .
3. Tingkat Kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Kabupaten Batu Bara tahun 2016-2021 berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi PAD .
4. Efisiensi, Efektivitas dan Kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB-P2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan manfaat penelitian, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Batu Bara, disarankan terus menggali potensi-potensi yang dapat meningkatkan penerimaan PBB-P2, sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Agar efisiensi penerimaan PBB-P2 dapat ditingkatkan maka perlu dilakukan dengan melakukan restrukturisasi organisasi dan tata kerja pengelolaan dengan penambahan SDM baru yang berkompeten dalam pengelolaan PBB-P2, serta memberikan sanksi terhadap wajib pajak.

3. Untuk mempertahankan efektivitas pengelolaan PBB-P2, dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan dan evaluasi pada berbagai seksi dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
4. Disarankan untuk meningkatkan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD, maka perlu dilakukan perbaikan terkait pengoptimalan penerimaan PBB-P2, seperti menambah sarana prasarana atau fasilitas pemungutan PBB-P2.



DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. I. (2017). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan (PBB-P-2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan*, *www.eprints.polsri.ac.dd*, 53(9), pp. 1689–1699.
- Ainiyah, G. Z., Y. A. Pratama dan E. Pradikha (2020). *Analisis Efisiensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara*. *JRKA Vol. 7 Isue 2*, : 1-12.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, S. (2014). *Metodologi Penelitian*. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI).
- Darmadi, H. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. I. Bandung: Alfabeta.
- Datu. (2012). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 9(1), pp. 2013–2015.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Pogram IBM SPSS*. Edisi Sembilan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2002). *Analisis varian atas anggaran pendapatan asli daerah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Khairunnisa, A. (2021). *Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Prinsip Value For Money (Studi Kasus Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara)*. Medan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Khoirinnisa, A. (2020). *Pengaruh Efisiensi, Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kudus Tahun 2015-2019* (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Manullang, M. and Pakpahan, M. (2014). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Citrapustaka Media
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Masitoh, S. (2018). *Analisis Efisiensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Deskriptif di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas)*. Available at:<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/4184>.
- Mayadi. (2015) *Dasar-Dasar Perpajakan*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Mulyadi. 2015. *Akutansi Biaya*. Edisi Lima. UPP STIM KPN. Yogyakarta
- Nordiawan, D. dan A. Hertianti. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Noviani, C. S. (2019). *Analisis efektivitas, efisiensi penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2014-2018* (Doctoral dissertation, Universitas Bangka Belitung).
- Ratulangi, U. S. (2016). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Tomohon*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2), pp. 267–277.
- Setiawati, N., Wahyudi, S., & Aulia, N. (2021). *Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batang Hari*. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1002-1010.
- SUHERMAN, S. D. E.(2020) *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*.
- Sleman. (2013). *Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar*. Thesis tidak diterbitkan. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Stevyanti, M., Hasanuddin, R., & Horas, E. (2020). *Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar*. *Accounting Journal*, 1(1), 321-330.
- Utiahrahman, N. R. (2016). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Tomohon*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2).

Wakhidah. (2017). *Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik*. Jurnal Online Universitas Negeri Surabaya.

Yoduke, R. dan S. Ayem. (2015). *Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014*, Jurnal Akuntansi Vol. 3 (2) : 40 – 50.

